

PERINGKAT DAERAH RAWAN PANGAN BERDASARKAN DATA SPASIAL DI PROVINSI ACEH¹
(Analise of Food Insecurity Base on Spatial in Nanggroe Aceh Darussalam Province)

Muyassir² dan Dahlan³

¹ Penelitian dibiayai oleh DP2M DIKTI, 2009

² Staf pengajar pada Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsyiah

³ Staf pengajar pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsyiah

ABSTAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelompokkan daerah rawan pangan dan memetakan wilayah rawan pangan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor penyebab rawan pangan pada setiap wilayah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Aceh yang meliputi 23 kabupaten/kota selama 8 bulan. Penelitian menggunakan metode survey, analisis secara deskriptif terhadap data sekunder yang meliputi : data pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan ada dua tingkatan wilayah rawan pangan di Provinsi Aceh yaitu; tingkat kerawanan pangan sedang (21,7%), dan tingkat kerawanan tinggi (78,3%). Jumlah Kabupaten/kota dengan kategori kerawanan pangan tinggi lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan daerah tingkat kerawanan sedang.

Kata Kunci: rawan pangan, spasial, Aceh

PENDAHULUAN

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan komitmen tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Laporan FAO tentang prospek hasil pertanian dan situasi pangan global menyebutkan Indonesia masuk negara dengan kondisi rawan pasokan bahan makanan. *Crops Prospect and Food Situation* yang dirilis FAO baru-baru ini mendata 37 negara, termasuk Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus terkait rawan suplai pangan yang dimungkinkan berlanjut pada 2008. Di dalam negeri, krisis pangan terjadi terutama di beberapa daerah yang terkena bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang sempat terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir (Hernanda, 2009).

Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat

didefinisikan sebagai “Suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu pendek/semesta maupun jangka panjang”. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001; Simatupang, Syafaat, Noekman, Syam, Demoredjo, & Santoso, 2001). Program pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia.

Sejalan dengan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah, maka telah terjadi perubahan penentuan prioritas program pada berbagai tingkat pemerintahan di Provinsi Aceh. Perubahan ini secara tidak langsung mempunyai dampak terhadap kinerja program penanganan rawan pangan oleh pemerintah. Oleh karena itu analisis kerawanan pangan berbasis spasial di

Provinsi Aceh akan sangat membantu pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dalam merumuskan berbagai aksi yang lebih tepat dan akurat. Sampai saat ini di provinsi Aceh belum ada usaha pengelompokan wilayah rawan pangan dalam bentuk peta pada tingkat kabupaten/kota. Disamping itu belum diketahui karakteristik dan bagaimana strategi kebijakan penanggulangannya.

Analisis kerawanan pangan dilakukan terhadap 23 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh dengan tujuan: (a) mengelompokkan daerah rawan pangan menurut indikator yang telah ditetapkan, (b). memetakan wilayah rawan pangan sampai tingkat kabupaten/kota, (c) mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor penyebab rawan pangan pada setiap wilayah, dan (d) merumuskan alternatif strategi kebijakan penanggulangan wilayah dan rumah tangga rawan pangan dalam upaya menurunkan jumlah rumah tangga miskin dan kelaparan di provinsi Aceh.

Peta kerawanan pangan merupakan alat bantu untuk memfasilitasi penyusunan strategi yang sesuai dalam penanganan masalah kerawanan pangan yang sedang terjadi dan mungkin dapat berlanjut pada jangka panjang. Menyediakan informasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mampu menghasilkan perencanaan yang lebih baik menentukan sasaran program Jaring Pengaman Sosial, dan membantu perencanaan menghadapi bencana, persiapan serta usaha untuk mengatasinya secara lebih tepat. Dengan melihat kondisi kerawanan pangan yang terjadi, penetapan kebijakan penanganan rawan pangan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi yang melatar belakangi terjadinya rawan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh yang meliputi 23 kabupaten/kota dengan masa penelitian 8 bulan. Penelitian menggunakan metode survey dengan pengumpulan data dan informasi untuk mengidentifikasi daerah rawan pangan.

Data yang bersifat skender tersebut adalah data selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Metode analisis melalui dua tahapan yaitu; tahap penyusunan indikator rawan pangan, dan tahapan penentuan wilayah rawan pangan. Analisis identifikasi wilayah rawan pangan dengan metode deskriptif melui analisis : data pertanian yaitu persentase luas kerusakan areal pertanian (LK), persentase luas panen terhadap luas tanam (LP), dan kecenderungan penurunan produktivitas padi (RP), prevalensi kurang energi protein pada anak balita (KEP), persentase jumlah keluarga miskin atau prasejahtera dan sejahtera I (PKS), dan produk domestic regional bruto (PRDB) atas dasar harga konstan. Kemudian masing-masing indikator dibuat skor dengan mengacu pada BBKP (Anonomous, 2001 dan Anonimous 2000). Persentase luas kerusakan areal pertanian atau luas areal puso < 5% , 5-10%, 10-15%, dan >15%. Persentase luas panen terhadap luas tanam >90%, 80-90%, 70-80%, dan <70%. Kecenderungan penurunan produktivitas padi <2%, 2-4%, 4-6% dan >6%. Penentuan skor KEP <20%, 20-30%, 30-40%, dan >40%. Persentase jumlah keluarga miskin (keluarga pra sejahtera dan sejahtera I) <20%, 20-30%, 30-40%, dan >40%. Penentuan skor PDRB adalah sebagai berikut; PDRB perkapita > Rp 1.000.000, Rp 750.000-Rp 1.000.000, Rp 500.000-Rp 750.000, dan < Rp 500.000. Masing-masing indikator tersebut diberi pembobotan (skor) berurutan dari 1 sampai 4.

Penentuan wilayah kerawanan pangan suatu wilayah berdasarkan indikator di atas dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi. Semakin besar jumlah total skor, maka semakin besar resiko krisis atau kerawanan pangan di suatu wilayah. Untuk keperluan tersebut digunakan batasan dalam tiga kategori yaitu: (a) total skor 9-12, atau salah satu indikator memiliki skor 4 wilayah mempunyai resiko rawan pangan tinggi, (b) total skor 6-8 atau dan tidak ada diantara ke-3 indikator yang memiliki skor 4 resiko rawan pangan sedang, dan (c) total 3-5 resiko rawan pangan ringan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Wilayah Rawan Pangan di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing indikator kerawan pangan di Provinsi Aceh sangat beragam antara suatu wilayah dengan wilayah kabupaten/kota lainnya. Karakteristik kerawanan pangan yang diamati berupa indikator pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Persentase Luas Areal Persawahan yang Mengalami Puso (LK)

Daerah puso didefinisikan sebagai daerah panen padi yang mengalami kerusakan disebabkan oleh kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit. Semakin luas wilayah puso, maka semakin banyak pula penduduk berpotensi mengalami kerawanan pangan yang disebabkan kerusakan yang terjadi di daerah panen. Persentase luas areal persawahan yang mengalami kerusakan atau puso di Provinsi Aceh rata-rata berkisar antara 0% sampai dengan 47,30% dari total luas areal penanaman. Terdapat 56,5% kabupaten/kota di Provinsi Aceh terjadi kerusakan areal persawahan kurang 5%, sebanyak 21,8% kabupaten/kota mengalami kerusakan areal pertanaman padi antara 5-10%, terdapat 4,3% kabupaten/kota mengalami kerusakan lebih 10% sampai 15% dari total luas penanaman padi, dan 17,4% areal pertanaman padi mengalami puso lebih dari 15% di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Luas areal persawahan yang mengalami puso terbesar terdapat di kawasan pesisir pantai Barat yaitu Kabupaten Aceh Jaya yaitu 47,30%. Persentase luas areal pertanaman padi puso di kabupaten Aceh Tamiang mencapai 37,40%, merupakan luas areal puso yang menduduki peringkat kedua dan Aceh Besar 24,93% menduduki peringkat ketiga di Provinsi Aceh.

Persentase Luas Panen Terhadap Luas Tanam (LP)

Persentase luas panen merupakan perbandingan antara luas panen padi sawah

dengan total luas tanam dikalikan seratus persen. Semakin tinggi persentase luas panen, berarti semakin kecil luas penanaman padi yang mengalami gagal panen di suatu wilayah, dan sebaliknya jika persentase luas panen kecil, maka luas lahan yang mengalami gagal panen lebih tinggi.

Hasil penelitian diketahui bahwa 78,3% kabupaten/kota di Provinsi Aceh mempunyai areal persawahan yang ditanam padi oleh masyarakat berhasil dipanen seluas lebih dari 90% dari total areal penanaman. Sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota atau 9% dapat dipanen padi seluas lebih dari 80% sampai dengan 90% dan lebih dari 70% sampai 80% dari seluruh areal penanaman padi, dan hanya 4,3% kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mencapai panen kurang dari 70% dari total luas penanam.

Kecenderungan Penurunan Produktivitas Padi (PR)

Hasil penelitian sebagaimana diperlihatkan dalam Lampiran 1 diketahui bahwa rata-rata produktivitas padi setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh sangat beragam mulai dari minus (-) 16,10% sampai plus (+) 18%. Tanda minus menunjukkan persentase penurunan dan tanda plus menggambarkan peningkatan produktivitas padi rata-rata per ha. Diketahui bahwa 78,3% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami penurunan produktivitas hasil padi sawah dalam 3 tahun terakhir kurang dari 2%. Sedangkan 4,3% wilayah kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami penurunan produktivitas padi lebih dari 2% sampai 4% dan lebih dari 4% sampai 6% dan 13,1% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami penurunan produktivitas padi lebih dari 6%.

Penurunan produktivitas hasil padi sawah di provinsi Aceh berkisar antara 0,07% sampai 16,10%, terlihat 10 wilayah atau 43,5% dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh mengalami penurunan produksi padi dengan berbagai tingkatan. Peningkatan produktivitas berkisar antara 1,45% sampai dengan 18%, sebanyak 8 wilayah atau 34,8% dari kabupaten/kota di

Provinsi Aceh terjadi peningkatan produksi. Terdapat 5 wilayah atau 21,7% dari wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mempunyai stagnasi produksi padi atau tidak mengalami penurunan produksi dan tidak pula meningkatkan produktivitas hasil padi sawah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Persentase luas areal puso dan persentase luas panen terhadap luas tanam menimbulkan dampak terhadap produktivitas padi sawah di Provinsi Aceh. Hal ini diduga karena kebanyakan lahan-lahan sawah yang ada kawasan pantai Barat seperti Aceh Jayah mengalami penurunan kualitas akibat tsunami 4 tahun silam. Selain itu, timbulnya fenomena di atas juga banyak diakibatkan faktor iklim yaitu kurangnya ketersediaan air pada masa-masa pertumbuhan tanaman padi. Beberapa daerah seperti kabupaten Bireuen dan Aceh Utara banyak bangunan irigasi yang mengalami disfungsi karena mengalami pendangkalan dan kerusakan. Beberapa kasus yang diduga menimbulkan kontribusi terhadap penurunan produktivitas padi adalah serangan hama seperti tikus, kepinding tanah, dan hama wereng.

Padi merupakan bahan pangan utama dalam masyarakat Aceh, sehingga hampir 100% masyarakat mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Sedangkan biji-bijian lain seperti kacang hijau, kedelai, jagung, dan umbi-umbian sejauh ini belum menjadi bahan makanan pokok di wilayah ini. Oleh karena itu dinamika produktivitas padi ini berdampak pada rasio konsumsi terhadap ketersediaan netto pangan biji-bijian perkapita perhari dan merupakan petunjuk kecukupan pangan pada suatu wilayah. Menurut Mulyasri dan Surihastuty (2003) konsumsi normative didefinisikan sebagai jumlah pangan biji-bijian yang harus dikonsumsi oleh seseorang perhari. Standar kebutuhan kalori per hari perkapita adalah 2.100 Kkal, 50% diantaranya bersumber dari sereal atau beras. Memenuhi kebutuhan kalori dari bahan pangan ini, maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 g beras perhari (1.100 Kkal).

Prevalensi Kurang Energi Protein pada Balita (KEP)

Data jumlah kurang energy dan protein pada balita (KEP) untuk setiap kabupaten/kota diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Informasi ini digunakan untuk menjangkau indikator kesehatan masyarakat di suatu wilayah kabupaten/kota sebagai salah satu indikasi kawasan rawan pangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persentase jumlah balita yang mengalami kekurangan energy dan protein disetiap kabupaten kota dalam Provinsi Aceh sangat beragam yaitu berkisar antara 0,19% sampai 4,44%, lebih rendah dari kasus busung lapar nasional yang menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun (8%). Dengan merujuk pada metodologi diketahui bahwa persentase kurang energy dan protein pada balita di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Aceh umumnya masih rendah yaitu kurang dari 20%.

Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (PKS)

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Data kepala keluarga (KK) miskin terdiri atas data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sesuai kriteria BKKBN. Data ini digunakan sebagai salah satu indikator yang terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat suatu wilayah. Indikator KK miskin dihitung berdasarkan proporsi jumlah keluarga miskin terhadap total keluarga di wilayah studi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persentase KK miskin di setiap kabupaten Kota dalam Provinsi Aceh bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Rata-rata

jumlah KK miskin di Provinsi Aceh berkisar antara 18,2% sampai 70,9%.

Diketahui bahwa 4,3% kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki penduduk dengan status rumah tangga prasejahtera dan sejahtera I kurang 20% dari seluruh KK yang ada di provinsi Aceh. Status tingkat kesejahteraan masyarakat ini hanya terdapat di Kota Banda Aceh yaitu 18,2% dari seluruh rumah tangga yang tinggal di wilayah ini. Sekitar 17,4% keluarga di Provinsi Aceh tergolong dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I pada peringkat dua yang berkisar antara 30 sampai 40 persen dari total KK yang ada. Terdapat 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan persentase jumlah KK miskin mencapai 40% dari total KK yang ada.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (PDRB Provinsi Aceh, 2008). Informasi PDRB diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Aceh tahun 2008 yaitu PDRB yang didasarkan pada harga konstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB kabupaten/kota di Provinsi Aceh bervariasi antara Rp 192.178 sampai Rp 35.010.034. Kabupaten/Kota dengan PDRB per kapita kurang dari Rp 500.000 dan Rp 500.000-750.000 masing-masing terdapat dalam 1 kabupaten. Dengan kata lain 4,3% kabupaten/kota di Provinsi Aceh mempunyai PDRB per kapita sebesar disebutkan di atas dijumpai di Kabupaten Aceh Besar yaitu Rp 192.172, dan Kabupaten Bireuen sebesar Rp 541.805. Satu kabupaten (4,3 %) dari kabupaten kota di Provinsi Aceh memiliki PDRB perkapita antara Rp 750.000 s/d Rp 1.000.000 yaitu kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 20 kabupaten kota atau (87%) dari wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mempunyai PDRB per kapita lebih besar dari Rp 1.000.000.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang

dihasilkan oleh suatu kabupaten/kota adalah tinggi. Berdasarkan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa 12,9 % kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonominya masih dalam kategori rendah. Indikator ini juga menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sector di kabupaten/Kota tersebut dari tahun ke tahun masih rendah, sehingga pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk wilayah tersebut juga rendah.

Skor Indikator Kerawanan Pangan

Penentuan skor untuk indikator LK, LP, PR, PKS, dan PDRB adalah sesuai dengan uraian dalam metodologi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat 21,7% kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami kondisi rawan pangan dengan tingkat kategori sedang dan 78,3% termasuk dalam kategori dengan tingkat kerawanan pangan tinggi. Selain itu juga kelihatan bahwa tidak ada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan status kerawanan pangan rendah. Hasil ini didukung oleh analisis yang dilakukan pemerintah sebagaimana dilansir Siswono (2007), "Aceh dulunya tidak ada daerah yang dilaporkan rawan pangan, sejak terjadi tsunami mulai ada beberapa daerah yang berstatus rawan pangan". Secara detil kawasan-rawan pangan di provinsi Aceh dapat dilihat dalam Gambar Lampiran 1.

Terjadinya kerawanan pangan di wilayah Provinsi Aceh pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya produksi dan tidak adanya kebijakan yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses pangan pokok serta mekanisme distribusinya. Senada dengan statemen Kepala Badan Ketahanan pangan Nasional, di daerah rawan pangan disebabkan produksi pangan yang tidak mencukupi atau tidak sampainya keseluruhan pelosok dengan harga terjangkau dan pada tingkat rumah tangga disebabkan lokasi yang terpencil serta kurangnya daya beli masyarakat untuk membeli pangan yang cukup (Kompas, 19 Agustus 2005).

Karakteristik Wilayah dan Faktor Rawan Pangan

Karakteristik wilayah rawan pangan di suatu tempat umumnya berbeda dengan tempat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap wilayah mempunyai karakteristik tersendiri secara spesifik memberi kontribusi terhadap dinamika pangan penduduk wilayah tersebut. Untuk wilayah provinsi Aceh karakteristik wilayah rawan pangan dicirikan dari beberapa dimensi yaitu:

Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan di wilayah provinsi Aceh identik dengan ketersediaan beras yang menjadi bahan pokok konsumsi energy bagi masyarakat. Ketersediaan pangan ini tercermin dari dinamika produktivitas padi di suatu wilayah. Produktivitas padi di Provinsi Aceh ($4,32 \text{ t ha}^{-1}$) lebih tinggi dari rata-rata produksi nasional ($2,0 \text{ t ha}^{-1}$). Rendahnya produktivitas padi sebagai dampak multi dimensi yang meliputi faktor iklim, jasad pengganggu, dan dukungan prasara.

Kegagalan panen atau terjadinya kerusakan areal padi di Provinsi Aceh umumnya terjadi kerana kekeringan akibat keterbatasan air pada masa-masa pertumbuhan tanaman padi sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 9. Gangguan jasad pengganggu berupa serangan hama tikus, kepinding tanah, dan wereng yang melanda beberapa wilayah kabupaten seperti Bireuen, Pidie dan Aceh Utara. Penurunan produksi padi akibat serangan jasad pengganggu di provinsi Aceh rata-rata mencapai 6,8% dari rata-rata produksi Provinsi (dinas tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Aceh, 2009). Beberapa bangunan irigasi seperti DAM, saluran irigasi primer dan sekunder yang dipergunakan untuk mengairi persawahan banyak yang mengalami disfungsi karena rusak diterjang banjir, debit air menyusut drastis sehingga tidak dapat mengairi persawahan untuk memproduksi bahan pangan. Kondisi wilayah menunjukkan pengaruh besar terhadap luas areal yang melami puso, persentase luas panen terhadap luas tanam dan penurunan produktivitas padi.

Akses Terhadap Pangan

Salah satu dimensi yang termasuk dalam faktor akses terhadap pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk dimensi ini, di Provinsi Aceh tercermin dari informasi banyak keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Berdasarkan karakteristik keluarga miskin ini, kecuali kabupaten Aceh Besar dan Bireuen, semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan persentase jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I $< 20\%$.

Hal lain yang diperkirakan mencerminkan karakteristik ini adalah adanya urbanisasi masyarakat daerah lain ke Provinsi Aceh selama pasca Tsunami sehingga jumlah penduduk Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data statistic menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan penduduk Aceh mencapai 49,0- sampai 52% per tahun (BPPS Provinsi Aceh, 2008). Hal ini menimbulkan kempetisi terhadap kebutuhan bahan pangan di Provinsi Aceh. Sementara itu, luas lahan sawah sebagai faktor produksi menunjukkan trend penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi areal pembangunan fisik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Terdapat dua kelompok wilayah rawan pangan di provinsi Aceh yang didasarkan pada indikator pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi. Sebanyak 21,7% wilayah kabupaten/kota di provinsi Aceh tergolong dalam tingkat kerawanan pangan sedang, dan 78,3% tergolong dalam tingkat kerawanan pangan tinggi dan tidak ada wilayah kabupaten kota di provinsi ini dengan status rawan pangan rendah.
2. Karakteristik dan faktor penyebab rawan pangan di Provinsi Aceh adalah rendahnya produktivitas hasil pertanian sebagai akibat dari cekaman alam dan pengelolaan teknik budidaya

padi. Selain itu juga karena belum optimalnya kemampuan sumberdaya ekonomi wilayah sehingga indikator PDRB masih rendah.

Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut skala kecamatan terutama pada wilayah-wilayah status rawan pangan tinggi dengan mengembangkan beberapa indikator spesifik lokasi.
2. Perlu adanya program akselerasi kearah pemantapan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan agar dapat diwujudkan ketahanan pangan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.
3. Pemerintah hendaknya mampu mengalokasikan dana APBD untuk mewujudkan ketahanan pangan seluruh masyarakat sehingga tercapai kemandirian pangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP2M Dikti Depdiknas atas dukungan biaya penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor: 212/SP2H/PP/DP2M/V/2009, tanggal 30 Mei 2009

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. 2008. Lima juta warga miskin rawan pangan. *Jurn. Ekonomi Edilogis*.
<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id36560.html>. Diakses Tanggal 18 Januari 2009.
- Anonimous. 2000. Situasi pangan dan gizi di Indonesia. Tim Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi Pusat, Jakarta
- Adi, A.C. 2006. Keragaan ketersediaan pangan dan pola konsumsi

keluarga miskin pada saat rawan pangan (Peceklik). (Studi di Daerah Rawan Pangan Pedesaan dan Perkotaan Kab. Kediri). *Jurn. Media Gizi Indonesia Universitas Airlangga*, Vol. 1 No. 3 - January-2006.

http://www.journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=1194&med=22&bid=3. Diakses tanggal 19 Januari 2009.

Ariani, M., H. P.Saliem, G. S.Hardono, & T. B Purwantini, 2007. Wilayah rawan pangan dan gizi kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Laporan Hasil penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI, Bogor

Ariningsih, E., & H.P.S., Rachman. 2008. Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan. *Jurn. Analisis kebijakan Pertanian*. Volume 6 No. 3 September 2008: 239-256

Dirgahayu, D. & I.N.S., Jaya, 2008. Ekstraksi informasi spasial kerentanan pangan menggunakan data inderaja dan SIG sebagai indikator ketahanan pangan. *Proc. Pertemuan Ilmiah Tahunan MAPIN XVII*, Tanggal, 10 Desember 2008, ITB Bandung.

Hardinsyah, Hartoyo, D. Briawan, C.M Daviriani & B. Setiawan. 1999. Membangun system ketahanan pangan dan gizi yang tangguh dalam Thaha et al (eds). *Pembangunan gizi dan pangan dalam perspektif kemandirian lokal*. Maj. Pergizi Pangan Indonesia dan Center for Regional Resource Development & Community Empowerment. Bogor

Hernanda, A.R. 2008. Republik Indonesia terancam rawan pangan. *Jurn. Ekonomi Edilogis*.

<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id36560.html>.

Diakses Tanggal 18 Januari 2009.

- Jaya, INS. 2007. Teknik-teknik pemodelan spasial dalam pengelolaan sumberdaya alam. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB., Bogor
- Martianto, D. & M. Ariani. 2004. Analisis perubahan konsumsi dan pola konsumsi pangan masyarakat dalam decade terakhir. Dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII “Ketahanan Pangan dan Gizi di Era otonomi Daerah dan Globalisasi”. Tanggal, 17 – 19 Mei 2004, Jakarta.
- Maxwell, S. & T.R. Frankenberger. 1992. Household food Security; Concepts, Indicators, Measurements a technical review. United Nations Children’s Fund – International fund for Agricultural Development (UNICEF)
- Mulyasri, J. & D. Sarihastuty. 2004. Peta Kerawan pangan, Kemiskinan dan kelaparan Provinsi Sumatera Utara
2003. Badan pusat Statistik Sumatera Utara, Medan
- Saliem, H.P., E.M. Lokollo, T.B. Purwantini, M. Ariani, & Y. Marisa. 2001. Analisa ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan regional. Laporan. Hasil penelitian. Pusat penelitian dan pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Simatupang, P.N. Syafaat, K.M. Noekman, A. Syam, S.K. Dermoredjo & B. Santoso. 2001. Kelayakan Pertanian Sebagai Sektor Andalan Pembangunan Ekonomi Nasional. Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Pembangunan Pertanian di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Tanggal 10 Mei 2001, Bogor.
- Suryana. A. 2001. Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Departemen Pertanian, Tanggal, 29 Maret 2001, Jakarta.

